

## **PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI\***

***Muhardi\*\****

### *Abstrak*

*Untuk membangun masyarakat madani dibutuhkan komitmen seluruh lapisan masyarakat secara sinergi dan tidak dapat dilakukan secara parsial. Salah satu upaya untuk menuju terbentuknya masyarakat madani adalah dengan mengentaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat itu sendiri.*

*Mengentaskan kemiskinan berarti menekan angka kemiskinan sekecil mungkin. Masyarakat yang mempunyai karsa (daya dan upaya) yang kuat adalah masyarakat yang mampu menekan angka kemiskinan itu sekecil mungkin. Dengan karsa dan adab (moral) yang kuat ini Insya Allah kita akan menuju ke arah kemandirian masyarakat yang tangguh yang sesuai dengan cita-cita dari masyarakat madani yaitu yang beradab dan berkarsa tinggi.*

*Kata Kunci : kemiskinan, masyarakat madani*

---

\* Makalah ini diambil dari salah satu Makalah Finalis LKTI-Unisba Tahun Akademik 1999-2000.

\*\* Muhardi, SE., M.Si. adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisba.

## 1 Pendahuluan

Tidak ada manusia di muka bumi ini yang rela dengan kemiskinan, tetapi kenapa kemiskinan itu masih saja ada di sekitar kehidupan manusia. Mengapa di negara maju seperti Amerika Serikat masih ada diantara masyarakatnya yang mengalami kemiskinan? Mengapa di Indonesia, masih ada pemukiman yang mencerminkan ketertinggalan ekonomi? Apakah semua itu terjadi karena keluputan perhatian? Yang pasti adalah kemiskinan atau kekumuhan yang saat ini ada bukanlah sesuatu yang terjadi dengan begitu saja. Dalam membangun masyarakat madani (*civil society*), kemiskinan yang terjadi harus dientaskan, sebab masyarakat madani merupakan masyarakat mandiri artinya masyarakat yang tidak rela dan tidak senang dengan adanya kemiskinan di lingkungannya.

Kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia terjadi sebagai akibat kompleksitas. Kompleksitas tersebut saling terkait satu sama lain, baik yang berhubungan dengan daya dukung lingkungan, lemahnya pemberdayaan manusia, maupun masih lemahnya pemanfaatan dan pencarian peluang untuk meningkatkan kinerja kehidupannya. Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, menurut Chamber (dalam Rachmat Iskandar; 1999) bahwa “kemiskinan suatu masyarakat sesungguhnya sangat terkait dengan lingkungannya dimana kemiskinan itu berada”. Karenanya perlu dipahami keterkaitan, proses, dan peluang bagi pengentasan kemiskinan dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam kaitan itulah maka dalam membangun masyarakat madani (*civil society*), pengentasan terhadap kemiskinan harus menjadi agenda dan perhatian utama yang tidak dapat ditawar-tawar, sebab mustahil akan tercipta suatu masyarakat madani jika kemiskinan masih merebah dalam masyarakat tersebut.

## 2 Perumusan Masalah

Pengentasan terhadap kemiskinan merupakan salah satu upaya yang berkonotasi positif dalam membangun masyarakat madani. Berkenaan dengan pandangan itulah maka permasalahan yang akan dikupas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana permasalahan kemiskinan yang terjadi (di Indonesia) ?

2. Bagaimana upaya untuk pengentasan kemiskinan dalam membangun masyarakat madani ?

### **3 Maksud dan Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui arti masyarakat madani
2. Untuk mengetahui permasalahan kemiskinan yang terjadi (di Indonesia)
3. Untuk mengetahui berbagai upaya untuk pengentasan kemiskinan dalam membangun masyarakat madani.

#### ***Arti Masyarakat Madani (Civil Society)***

Masyarakat madani (*civil society*) pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah *societies civilis* yang sampai kini mengalami perkembangan pengertian. Kalau Cicero memahaminya identik dengan negara, maka kini dipahami sebagai kemandirian aktivitas warga masyarakat berhadapan dengan negara (Masykuri Abdillah, dalam M. Deden Ridwan dan Asep Gunawan (Ed.), 1999 : 165-166). Di lain pihak Jean L. Cohen & Andrew Arato (1992 : ix) memahami masyarakat madani sebagai “*a sphere of social interaction between economy and state, composed above all of the intimate sphere (especially the family), the sphere of associations (especially voluntary associations), social movements, and from of public communication*”. Definisi ini serupa dengan definisi yang dikemukakan Alfred Stepan (1996 : 13-14), yakni “arena tempat berbagai gerakan sosial (seperti himpunan ketetangaan, kelompok wanita, kelompok keagamaan dan kelompok hukum, wartawan, serikat buruh dan usahawan) berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan memajukan berbagai kepentingan mereka.

Istilah *civil society* berasal dari barat, meskipun secara esensial konsep ini sebenarnya sudah terlebih dahulu dikemukakan al-Farabi dalam bukunya, *Al-Siyasah al-Madaniyyah* sebagaimana disebutkan Rosenthal. Dalam bahasa Arab, *civil society* pun diterjemahkan dengan istilah “*al-mujtama al-madani*”, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “masyarakat madani” (Masykuri Abdillah, dalam M. Deden Ridwan dan

Asep Gunawan (Ed.), 1999 : 165-166). Menurut doktrin Islam, umat diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Allah, rasul-Nya dan para pemegang kekuasaan (QS. Ali Imran : 59), namun mereka juga berkewajiban untuk melakukan kontrol sosial (*amr ma'ruf nahi munkar*), termasuk juga tanggung jawab terhadap pengentasan kemiskinan, serta memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya dan melakukan aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari berbagai pemahaman di atas, masyarakat madani tiada lain mencerminkan masyarakat mandiri, dalam arti masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan kontrol di dalam dirinya sendiri dan juga ada komitmen yang kuat untuk memecahkan berbagai permasalahan kehidupan, karena tanpa itu tidak bisa dibangun masyarakat madani. Bagaimanapun juga kemiskinan tidak akan dapat dientaskan secara baik jika tidak ada komitmen yang kuat dan kemandirian masyarakatnya. Dengan demikian dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan, termasuk dalam hal ini adalah pengentasan masyarakat dari kemiskinan merupakan salah satu upaya riil yang harus ditumbuhkembangkan dalam membangun masyarakat madani.

#### **4 Permasalahan Kemiskinan yang Terjadi (di Indonesia)**

Sebelum diuraikan lebih lanjut berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk pengentasan kemiskinan dalam membangun masyarakat madani, maka ada baiknya jika terlebih dahulu dikaji berbagai permasalahan mendasar yang menyebabkan kemiskinan terjadi selama ini, khususnya di Indonesia. Berbagai kelebihan telah menyoroti tentang kemiskinan ini sejak lama, bahkan mungkin secara ekstrim sejak masyarakat atau bangsa ini ada, walaupun secara jujur dalam bentuk riil belum ada perhatian secara optimal atau dengan kata lain masih dilakukan dengan secara setengah hati. Kita menyadari bahwa kemiskinan ini sesungguhnya tidak disebabkan satu faktor tunggal, tetapi disebabkan oleh kompleksitas di dalam lingkungan di mana kemiskinan itu terjadi.

Masyarakat Indonesia, menurut sebagian pendapat secara umum telah mengalami kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah (*underdevelopment trap*) atau masuk dalam lingkaran kemiskinan (*poverty trap*); baik karena kelemahan kualitas sumberdaya manusianya, yang belum mampu menjadi human capital atau disebabkan kemiskinan (*low income*) yang merupakan

sumber dan dampak kemiskinan (lihat gambar 1 dan 2). Menurut DV Ramana (dalam Soeharsono Sagir, 1998:4) pendapatan yang rendah (miskin) merupakan sumber keterbelakangan, kekurangan gizi, tidak ada biaya pendidikan, tidak dapat menabung, daya beli rendah, daya saing produk rendah, tidak mampu membayar pajak; hal ini merupakan lingkaran setan (*vicious circle*). Terlebih-lebih dengan adanya krisis yang menimpa bangsa Indonesia ternyata telah membawa dampak yang mendalam pada kemiskinan, pengangguran dan daya beli, sehingga amatlah sulit bagi berjuta-juta orang dan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara riil pendapatan masyarakat menurun tajam sehingga mengakibatkan masyarakat atau penduduk tersebut secara ekonomi menjadi miskin.

Dalam literatur ekonomi pembangunan dikenal beberapa indikator kemiskinan untuk mengetahui batas atau garis kemiskinan suatu masyarakat atau daerah. Garis kemiskinan secara ideal seharusnya mencakup indikator sosial dan ekonomi, yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga secara menyeluruh (Anggito Abimanyu, 1991:1). Menurut angka yang dikeluarkan oleh pemerintah dan *international labor organization (ILO)* bahwa terdapat sekitar 80-90 juta orang miskin sejak pertengahan sampai akhir tahun 1998, BPS juga memperkirakan penduduk miskin akan mencapai sekitar 39%. Angka ini menunjukkan kenaikan hampir empat kali dari 22 juta yang diperkirakan miskin pada tahun 1966, sesuai dengan angka statistik berdasarkan data SUSENAS. Kalau angka ini bisa diterima, maka angka kemiskinan sesungguhnya sudah meningkat sebesar 40% kira-kira sama besarnya dengan yang tercatat pada tahun 1976, dan lebih dari dua kali yang tercatat selama dasawarsa terakhir. Menurut perkiraan Anggito Abimanyu (1999:1), jumlah orang miskin absolut yang lebih realistis-tanpa akses pangan yang cukup dan pengeluaran untuk kebutuhan non-pangan pada tingkat yang sangat mendasar mungkin meningkat sekitar 25-35% atau sekitar 30-40 juta orang, dan angka kemiskinan mungkin meningkat sekitar 12-15% pada tahun 1998. Bank Dunia dengan menggunakan gabungan antara *Family Life Survey*, SUSENAS, dan UNICEF (1999) menggunakan data yang lebih baru, memprediksi angka kemiskinan di Indonesia berkisar 12 hingga 14%.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa ada sebuah kompleksitas yang mengakibatkan kemiskinan atau kekumuhan melanda masyarakat Indonesia sehingga angka kemiskinan tersebut cukup tinggi. Kompleksitas tersebut saling terkait satu sama lain, baik yang berhubungan dengan soal daya dukung lingkungan, sumberdaya manusia, maupun peluang yang kesemuanya itu masih harus dilihat dalam perspektif mikro dan makro.

Dalam perspektif mikro, kompleksitas akan bersandar pada keadaan individu bersangkutan yang relatif memiliki keterbatasan dalam “mengeluarkan” diri dari jeratan kemiskinan. Seperti misalnya lantaran tidak mampu memahami peluang, lamban dalam kerja keras, kurang terampil, dan lain sebagainya. Sementara dalam tataran makro, kemiskinan dipahami sebagai pengaruh dari struktur sosial yang ada, dimana masih ada keterbatasan kesempatan dan peluang yang bisa diperoleh secara masal.

Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sisi, ada sekelompok orang yang melihat kemiskinan justru sebagai sesuatu yang bisa diperalat atau diperdayai. Kelompok ini berusaha memanfaatkan kemiskinan individu atau kelompok lain. Dalam bentuk yang lebih luas sampai ke tingkat negara yang memanfaatkan kemiskinan negara lain untuk kepentingannya Bahkan dalam lingkup internasional, kelompok seperti ini dipandang klasik dan tak pernah akan hilang selama dunia ini masih ada. Adanya berbagai kemiskinan dan ketertinggalan yang dialami negara berkembang yang dimanfaatkan oleh negara-negara maju telah dibahas oleh beberapa pemerhati pembangunan seperti Durolf H. Strahm, Roxborough, Bjorn Hettne (dalam Basofi Soedirman, 1997). Mulai dari kepentingan untuk uji coba politik sampai dengan kepentingannya untuk ladang “eksplorasi” ekonomi.

Dalam kondisi sekarang ini, hubungan yang dibangun oleh negara maju terhadap negara berkembang, tentu saja tidak seperti zaman pra perang dunia kedua yang serba terlihat ketumpangannya. Sekarang ini jauh lebih halus walaupun pada tujuannya tetap memposisikan negara berkembang sebagai “anak bawang” yang bisa diombang-ambing. Kalau dulu kemiskinan itu dijadikan sebagai “sapi perahan”, maka sekarang bukan rahasia lagi kalau kemiskinan dijadikan alat *bargaining*, dengan harapan agar dapat mendikte jalannya urusan negara yang dibantunya. Semua ini dalam konteks tertentu yang pada gilirannya tidak banyak memberi makna kepada perbaikan negara yang tertinggal, termasuk negara Indonesia yang berada pada tahap sedang membangun.

Dalam konteks mikro, perilaku yang memanfaatkan kemiskinan pihak lain bisa dilihat dari perlakuan mereka terhadap kondisi kemiskinan, apakah dengan cara membiarkan miskin terus-menerus, atau yang mengeksploitasi hayalannya. Melalui cara yang halus, tipologi seperti ini juga ada pada orang-orang yang asyik mempersoalkan kemiskinan untuk popularitas dirinya. Di sini kemiskinan orang lain ia bangun menjadi angan-angan. Sehingga yang bersangkutan berusaha memanfaatkan istilah pengentasan kemiskinan dan

ketimpangan sosial untuk kepentingan dirinya agar dianggap orang lain sebagai kelompok yang peduli rakyat kecil. Dengan alasan untuk kepentingan “wong cilik” atau rakyat banyak tetapi dibalik itu dia sesungguhnya hanya memanfaatkan kemiskinan bagi kepentingan atau kemajuan dirinya semata.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai kurang lebih 202 juta jiwa, sebagian besar hidup dan berada di pedesaan. Artinya kemiskinan yang terjadi di Indonesia diderita oleh sebagian besar mereka yang berada di pedesaan. Kemiskinan yang dialami masyarakat tersebut sudah merupakan kompleksitas, yaitu miskin dari berbagai sisi, baik itu sisi ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, lemahnya pemahaman terhadap informasi, akses pasar, dan ketidakmampuan mereka dalam menciptakan peluang-peluang usaha sehingga menyebabkan terjadinya kompleksitas. Padahal dalam masyarakat madani kemandirian dan komitmen untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai basis kekuatan ekonomi menjadi prasyarat penting. Kemiskinan dan ketertinggalan yang dialami bangsa ini tidak mustahil akan menjadikan masyarakat kita hanya sebagai penonton dalam gelanggang persaingan di segala bidang, oleh sebab itu kemiskinan harus dientaskan bukan hanya slogan belaka (*lips service*). Sebab, negara yang maju adalah negara yang didukung oleh kesadaran dan komitmen rakyatnya untuk maju yang tidak mungkin dibangun dengan berangan-angan tanpa berusaha untuk lebih baik.

## **5 Pengentasan Kemiskinan Dalam Membangun Masyarakat Madani**

Upaya pengentasan kemiskinan dalam membangun masyarakat madani tidaklah semudah membalikkan tangan. Karena kompleksitasnya permasalahan kemiskinan yang mesti dihadapi sehingga harus dilakukan secara terprogram dan terencana dari hulu ke hilir. Karenanya dengan program pengentasan kemiskinan yang dibuat secara tergesa-gesa dengan motto *try be error* harus dihindari sebab dapat membuat program tersebut menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Kesadaran mengenai hal ini penting sekali, sebab kesadaran yang naif mengenai kemiskinan dan pengentasan terhadap kemiskinan, ketimpangan sosial dan sebagainya, seringkali membuat orang berperilaku yang tidak semestinya. Ada dua penyebab timbulnya sikap pasif dalam memandang kemiskinan dan upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, disebabkan karena memang tidak mempunyai nurani kemanusiaan. Kedua, karena merasa yang ada sekarang ini sudah baik dan

sebagaimana mestinya. Kedua kondisi ini sama-sama tidak kondusif serta tidak relevan berada dalam konteks negara kita yang sedang diarahkan kepada masyarakat mandiri dan beradab dalam arti masyarakat madani.

Sementara yang kondusif dalam mengentaskan kemiskinan adalah mereka yang memahami kemiskinan sebagai bagian dari kelemahan yang harus dientaskan dari akarnya, melalui program yang namanya pembangunan. Mereka inilah yang sesungguhnya kita butuhkan dalam membangun masyarakat madani, yang memahami kemiskinan tidak sebagai barang dagangan dan modal untuk mencari popularitas, melainkan sebagai realitas yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh dalam arti tidak setengah hati. Perlu disadari bahwa sesungguhnya semua kalangan dapat memberikan kontribusi untuk mengentaskan kemiskinan ini. Alim ulama misalnya dengan *amar ma'ruf nahi munkar*-nya, sangat berperan membantu pengentasan kemiskinan dalam membangun masyarakat madani, sebab dengan kemiskinan ini akan dapat membawa orang kepada kekufuran. Demikian juga dengan para intelektual, ia bisa menyebarkan informasi dan cara-cara berpikir yang baik, teknologi yang tepat guna, manajemen yang baik dan seterusnya, yang sesungguhnya sangat kondusif untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan ketinggalan. Pengusaha pun punya kontribusi untuk itu. Karenanya, kalau semua pihak mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan dalam rangka menuju masyarakat madani, maka sesungguhnya kemiskinan itu dapat dientaskan. Persoalannya adalah apakah kita ini termasuk kalangan yang senang memanfaatkan kemiskinan? Yang hanya bisa berselogan saja? Ataukah tergolong yang ikut berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Ini perlu dijawab oleh masing-masing diri kita sendiri.

Dalam rangka membangun masyarakat madani berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan manusia harus dicapai melalui usaha dan jaringan kerjasama dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera sebagai bagian dari masyarakat madani global. Untuk mewujudkannya maka seruan untuk mengentaskan kemiskinan harus secara terpadu dan sinergis. Jika tidak dipecahkan secara terpadu dan sinergis melalui berbagai upaya seperti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kesungguhan dan kesadaran, maka pemecahan terhadap lingkaran kemiskinan (*proverty trap*) sulit diselesaikan jika hanya berupaya secara parsial. Di lain pihak, Malisis (dalam Soeharsono Sagir, 1998:4) menyatakan lingkaran kemiskinan hanya mungkin dilakukan dengan memulainya dari peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya

*Membangun Budaya Akademik Mengantisipasi Persaingan Global* 235  
*Di Bidang Jasa Pendidikan Tinggi Dalam Memasuki Era Perdagangan Bebas (Afia 2003) (Alex Sobur)*

manusianya secara terpadu sehingga menjadikannya sebagai *human capital* dalam arti tidak lagi hanya sebagai sumber daya manusia semata, tetapi menjadikannya lebih sebagai manusia yang bersumberdaya.

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan dalam membangun masyarakat madani harus dilakukan dengan kesadaran dan program-program yang mengarah pada perbaikan kualitas hidup seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat madani global. Beberapa syarat dan langkah konkrit yang perlu diperhatikan dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut antara lain :

1. Perlu ada komitmen yang kuat dari kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu, bukan hanya slogan dan *lips service* belaka tetapi komitmen yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai ciri masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab dan mandiri. Tanpa komitmen yang melandasinya maka tindakan riil sulit dioptimalkan, sebab adanya komitmen dan keterpaduan diantara kita semua untuk mengentaskan masyarakat atau rakyat dari kemiskinan adalah merupakan syarat untuk kunci suksesnya.
2. Agenda pengentasan kemiskinan haruslah realistis dan menyentuh kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar bagi rakyat Indonesia, misalnya dalam jangka pendek maka penanganannya harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan untuk rakyat dari yang mengalami rawan pangan.
3. Orientasi pembangunan masyarakat madani harus bertumpu dan berakar pada rakyat. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, pengentasan kemiskinan harus ditujukan untuk memperbaiki struktur ekonomi pangan dan pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada orientasi rakyat, merata serta bebas dari K3N2I (korupsi, kolusi, koncoisme, nepotisme, niputisme, ijinisme). Salah satu ciri pokok dari masyarakat madani adalah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak, bukan segelintir orang tertentu.
4. Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan paling tidak harus mempunyai sasaran strategis yang dapat berupa perluasan kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan produktivitas masyarakat berpenghasilan rendah. Kemiskinan struktural harus dientaskan terutama bagi rakyat yang hidup

- di sektor pertanian (pedesaan) atau *rural area* dan sektor informal perkotaan.
5. Dalam jangka panjang perlu peningkatan secara terus menerus kualitas sumberdaya manusia, sehingga menjadi manusia yang betul-betul bersumberdaya, salah satunya dapat dilakukan melalui pembudayaan proses pembelajaran sepanjang hayat (*life long education*), sebab kebodohan dan ketertinggalan bukan ciri dari masyarakat madani.

Persoalan utama untuk pengentasan kemiskinan sebenarnya terletak pada diri masyarakat itu sendiri, sampai kapan kita akan dapat keluar dari kemiskinan? Siapa yang paling berperan penting dalam mengatasi kemiskinan itu? Apakah kita mampu mewujudkan masyarakat atau bangsa ini menjadi masyarakat madani? Jawabnya tentu saja sangat tergantung dan ada pada diri kita sendiri. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang pada dasarnya sejak nenek moyang kita sudah terkenal dan mengakar sebagai sebutan masyarakat yang beradab tinggi, ketimuran dan kekeluargaan (*brotherhood*), sebenarnya adalah modal dasar utama yang telah dimiliki bangsa ini untuk mewujudkan masyarakat madani. Sebuah masyarakat yang mempunyai karsa yang tinggi, beradab tinggi, saling menghormati satu sama lain, tolong-menolong, dan selalu berusaha menjalankan dan menebarkan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya kemandirian dan komitmen yang kuat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan mutlak diperlukan. Hal ini tentu saja akan membawa konsekuensi terhadap mereka dalam memahami terwujudnya masyarakat madani, dan untuk membawa ke arah itu tentu saja memerlukan suatu proses. Dalam konteks Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat madani tersebut sebagaimana telah dikemukakan di atas yaitu diperlukan peran serta seluruh masyarakat dari mulai lapisan atas sampai ke lapisan bawah.

## 6 Penutup

Membangun masyarakat madani (*civil society*) berarti membangun kemandirian masyarakat yang mengarah kepada abad dan karsa yang tinggi. Dengan demikian kemiskinan dan ketertinggalan yang dialami dan dirasakan sebagian masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dengan adanya dampak krisis yang berkepanjangan sehingga membawa sebagian masyarakat ke arah kemiskinan secara ekonomi, harus dientaskan dengan sungguh-sungguh.

Dalam upaya pengentasan terpadu ini menjadi tanggung jawab kita semua bangsa Indonesia.

Kita sadari bahwa upaya pengentasan kemiskinan dalam membangun masyarakat madani tidaklah semudah mengucapkannya, tetapi diperlukan berbagai upaya, proses, waktu dan kerja keras kita semua. Oleh karenanya komitmen yang kuat, usaha yang realistis dan terpadu, orientasi pada keberpihakan terhadap rakyat, adanya sasaran strategis yang jelas dan layak, dan peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan beberapa upaya yang perlu dilakukan secara realistis untuk membangun masyarakat madani, yang mempunyai adab dan karsa yang tinggi sebagai wujud dari masyarakat Indonesia yang dicita-citakan di masa mendatang.

-----

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfred Stepan. 1996. *Rethinking Military Politics : Brazil and the Southern Cone*, terjemahan : *Militer dan Demokratisasi : Pengalaman Brazil dan Beberapa Negara Lain*. Jakarta : Grafiti.
- Jean L. Cohen and Andrew Arato. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Canbridge, Massachusetts and London : MIT Press.
- Masykuri Abdillah. 1999. *Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Dalam M. Deden Ridwan dan Asep Gunawan (Ed.) : *Demokrasi Kekuasaan. Wacana Ekonomi dan Moral untuk Membangun Indonesia Baru*. Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan The Asia Foundation.

### **Lain-lain :**

- Anggito Abimanyu. 1999. *Misteri Angka Kemiskinan dan Revisi RAPBN 1999/2000*. Dalam HU. Republika. Jakarta : PT. Abdi Bangsa.
- Basofi Soedirman. 1997. *Kemiskinan*. Dalam HU. Republika Jakarta : PT. Abdi Bangsa.
- Rachmat Iskandar, 1999. *Solusi Pengentasan Kemiskinan di Jawa Barat*. Dalam HU. Pikiran Rakyat. Bandung : PT. Percetakan Offset Granesia.

Soeharsono Sagir. 1998. *Kebijaksanaan Reformasi Ekonomi untuk Memperkuat Aspek Fundamental*. Makalah Seminar Bandung : Program Pascasarjana UNPAD.